

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT UPAH
KARYAWAN
PADA USAHA TAMBAK UDANG DI KECAMATAN POTO TANO**

PROPOSAL PENELITIAN



Diajukan Oleh :

FATIMAH
16.01.02.0.166-01

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI & MANAJEMEN
UNIVERSITAS SAMAWA
SUMBAWA BESAR
2020**

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
TINGKAT UPAH KARYAWAN PADA USAHA TAMBAK UDANG
DI KECAMATAN POTO TANO**



Sumbawa, 11 februari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

SUPRIANTO, SE.,ME
NIDN : 0815068303

ISMAWATI, SE,MM
NIDN : 0801018103

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
TINGKAT UPAH KARYAWAN PADA USAHA TAMBAK UDANG
DI KECAMATAN POTO TANO**

Oleh :

**FATIMAH
16.01.02.0.166.-01**

Proposal ini telah diuji dan dipertahankan di depan
Dewan Penguji Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa (UNSA)
Sumbawa Besar

Pada hari :
Tanggal : 2019
Jam : WITA
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

Dewan Penguji :

1. Ketua : (_____)
2. Anggota I : (_____)
3. Anggota II : (_____)

KATA PENGATAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyajikan tulisan proposal skripsi yang berjudul : **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Samawa Bapak DR. Syafruddin, SE., MM. Penulis menghaturkan terima kasih yang teramat dalam atas kesempatan yang bapak berikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Samawa.
2. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Bapak Suprianto, SE., ME. atas kesediaannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta kesediaan menjadi dosen pembimbing I, penulis banyak mendapat ilmu dan keberkahan atasnya.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Ibu Roos Nana Sucihati, SE., MM. atas kebaikan hatinya memberikan kesempatan belajar kepada penulis, selalu bersemangat dalam menyumbangkan gagasan intelektualnya bagi kemajuan prodi serta aliran ilmunya dalam diri penulis.
4. Ibu Ismawati, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing II yang turut setia memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.

5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas dorongan kuat, do'a dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut berperan dalam memperlancar penulisan proposal skripsi ini.

Selanjutnya, sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti tetapi dirasakan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Sumbawa Besar,.....2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Sebelumnya	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.3 Kerangka Konseptual	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.2.1 Jenis Data	27
3.2.2 Sumber Data.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Identifikasi dan Klasifikasi Variabel.....	29
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian menjadi sumber pendapatan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Subsektor perikanan merupakan salah satu dari subsektor pertanian yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2015) pengembangan subsektor perikanan terbagi atas perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Usaha perikanan budi daya terdiri dari budi daya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, jaring tancap, dan sawah. Produksi perikanan budi daya terbesar di Indonesia adalah budi daya laut yang diikuti oleh tambak sebagai produksi terbesar kedua dengan jumlah 10.174.024 ton per tahun (DJP2HP, 2015)

Budi daya tambak menjadi salah satu mata pencaharian terbesar kedua setelah pertanian jagung di Kecamatan Poto Tano. Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat menjadi sentra produksi usaha tambak dengan jumlah produksi 8.204 ton per tahun (BPS Provinsi NTB, 2016). Komoditas perikanan tambak yang dibudidayakan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah udang windu dan udang vaname. Sebagai komoditi perdagangan ekspor maka udang senantiasa dituntut memiliki mutu yang prima. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem jaminan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

Salah satu perusahaan yang bergerak pada industri udang adalah PT. Mitra Sejahtera. Salah satu faktor utama mengapa industri udang PT. Mitra Sejahtera terdapat di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, dikarenakan lokasinya sangat dekat dengan pertanian tambak udang windu sehingga dapat meringankan biaya produksi dan juga masih minimnya industri yang berdiri di Kecamatan Poto Tano dan sekitarnya yang memiliki ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat banyak.

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan ini melakukan Perekrutan tenaga kerja lokal maupun regional. Seluruh pekerja diberikan subsidi sebagai jaminan kehidupan yang layak oleh perusahaan. Subsidi tersebut diantaranya adalah rumah, tambak beserta peralatan, beras, sembako, air bersih, listrik, dan gaji bulanan. Pekerja tidak diperkenankan membawa anggota keluarga ke area perusahaan. Gaji yang diterima Pekerja sesuai dengan upah minimum regional, namun apabila panen yang diperoleh Pekerja melebihi target, maka Pekerja akan mendapatkan bonus berupa uang sebagai *reward*.

Upah sebagai salah satu *reward* atas kerja karyawan merupakan jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang atau pun jasa yang diberikan kepada mereka.). Upah berasal dari hasil penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka, juga termasuk laba dari penjualan atau pertukaran *asset* (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi dan kenaikan lainnya pada *equity* pemilik kecuali yang berasal dari

modal donasi dan penyesuaian modal (Niswonger & Fess, 1992:22). Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Dalam hal ini termasuk juga perubahan *net asset* yang timbul dari kegiatan produksi dan dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva dan investasi, kecuali kontribusi modal dan penyesuaian modal (Harahap, 1999).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petambak udang vaname masalah yang sering dihadapi oleh penambak udang adanya penyakit yang menyerang udang sehingga terjadi gagal panen di sebagian besar tambak. Oleh karena itu perusahaan lebih meningkatkan pengawasan dari segi pemberian pakan dan obat-obatan, dalam hal ini dibutuhkan karyawan yang betul-betul peduli dan paham kondisi udang, sehingga kondisi udang selalu terjaga, dari hal itulah pengaruh pendidikan sangat penting karena didasari oleh tingkat pemahaman.

Tabel 1.1
Data Karyawan Dari Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SEKOLAH DASAR	3
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	6
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS	49
4	DIPLOMA I	1
5	DIPLOMA II	0
6	DIPLOMA III	2
7	STRATA I	10
JUMLAH		71

Sumber Data : PT. Mitra Sejahtera

Menurut Todaro (2011) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan

Dalam Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, 2004).

Pada usaha tambak udang dibutuhkan keahlian dan tingkat pendidikan yang sesuai karena dalam usaha tambak udang pengetahuan tentang perubahan pola budi daya menyebabkan perubahan penggunaan sarana produksi. Petambak harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi. Kondisi perekonomian petambak mempengaruhi ketersediaan sarana produksi. Semakin tinggi perekonomian petambak maka semakin besar kemungkinan terpenuhinya sarana produksi, namun semakin

rendah perekonomian petambak maka faktor-faktor produksi tidak dapat tersedia secara maksimal. Hal ini akan berdampak pada hasil produksi udang sehingga dapat mempengaruhi penerimaan petambak. Apabila produksi yang dihasilkan semakin besar maka penerimaan akan semakin tinggi. Besarnya penerimaan akan berakibat pada pendapatan yang diperoleh petambak. Semakin rendah biaya yang dikeluarkan serta tingginya penerimaan petambak akan berakibat pada tingginya bonus dan upah yang akan diberikan kepada pekerja.

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai *stock* manusia. Dimana nilai *stock* manusia setelah mengikuti pendidikan, dengan berbagai jenis, jenjang dan bentuk pendidikan dapat meningkatkan berbagai bentuk nilai. Para ekonom mengklasifikasikan bahwa nilai yang diperoleh adalah berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktifitas kerja, peningkatan nilai sosial (*social benefits*) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa dengan proses investasi saat sekarang, maka manfaat yang akan diperoleh oleh individu adalah pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan nilai *stock* manusia, maka seseorang atau rumah tangga juga perlu mengorbankan biaya, baik yang ditanggung oleh individu maupun oleh masyarakat (Elfindri, 2004;69)

Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari rata-rata lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah dimanfaatkan untuk melihat kualitas pekerja tambak berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin tinggi

tingkat pendidikan pekerja, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang yang akan berdampak pada semakin besarnya produksi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Upah Karyawan pada Usaha Tambak Udang di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Usaha perikanan budi daya terdiri dari budi daya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, jaring tancap, dan sawah.
- b. Sebagai komoditi perdagangan ekspor maka udang senantiasa dituntut memiliki mutu yang prima. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem jaminan, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- c. Petambak udang vaname masalah yang sering dihadapi oleh penambak udang adanya penyakit yang menyerang udang sehingga terjadi gagal panen disebagian besar tambak. Oleh karena itu perusahaan lebih meningkatkan pengawasan dari segi pemberian pakan dan obat-obatan, dalam hal ini dibutuhkan karyawan yang betul-betul peduli dan paham kondisi udang, sehingga kondisi udang selalu terjaga, dari hal itulah pengaruh pendidikan sangat penting karena didasari oleh tingkat pemahaman.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka batasan masalah dalam penelian ini adalah “ Tingkat Pendidikan terhadap Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang di PT. Mitra Sejahtera, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah “Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Upah Karyawan pada Usaha Tambak Udang di PT. Mitra Sejahtera, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan “Untuk Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Upah Karyawan pada Usaha Tambak Udang di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat”.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu cara untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa Sumbawa Besar.

- b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- c. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Tingkat Pendidikan dan Upah usaha tambak udang.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya, agar dapat memberikan wawasan baru berkenaan dengan pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Upah pada usaha tambak udang sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan terkait upah dan pendidikan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

- 1. Saidin (2016)** “Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Minyak Goreng Asli Mandar di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada pada sektor industri, merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan pada sektor industri tersebut. Berhasil tidaknya suatu organisasi kerja dalam mencapai tujuan akan tergantung pada unsur manusianya, termasuk tenaga kerja pada industri minyak yang ada di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Selain kualitas sumber daya manusia yang harus diperhatikan, perlu diperhatikan pula faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, yaitu faktor upah, tingkat pendidikan dan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara upah, tingkat pendidikan dan teknologi secara parsial dan secara simultan terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri minyak goreng asli Mandar. Populasi penelitian ini berjumlah 90 tenaga kerja, sampel yang digunakan sebanyak 70 yang diambil dari bagian produksinya saja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, interview atau wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ada pengaruh positif upah terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri minyak di

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan tidak signifikan pada taraf 5%. Tingkat pendidikan merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Variabel teknologi merupakan penjelas yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Kesimpulan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel upah, tingkat pendidikan dan teknologi secara parsial dan simultan terhadap produktivitas tenaga kerja. Saran dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1) Pemilik industri minyak hendaknya memperhatikan pemberian upah bagi para pekerja agar tenaga kerja termotivasi untuk menunjang produktivitas kerjanya. 2) Pengusaha memberikan pengawasan dan motivasi terhadap semua tenaga kerjanya dalam hal keahlian yang dimiliki, dapat meningkatkan produktivitas kerja. 3) Pengusaha minyak harus meningkatkan teknologi dan untuk pengusahayang masih menggunakan teknologi sederhana agar beralih ke teknologi modern.

2. **Dedi Julianto (2019)**, “Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu Di Sumatera Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan yang ditamatkan terhadap tingkat pendapatan individu di Sumatera Barat. Selain itu juga meneliti penghasilan seseorang jika dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin dan daerah tempat tinggalnya. Metode analisis yang dipakai di dalam penelitian ini adalah gabungan antara analisa deskriptif dan analisa kuantitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data SUSENAS

2016. Untuk mendukung penelitian ini penulis juga menggunakan sumber lain berupa jurnal atau artikel-artikel, buku-buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mendapatkan bahwa Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga akan meningkat. Faktor usia juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Untuk pengujian kelompok usia dibawah 30 tahun tingkat pendapatannya lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya. Faktor jenis kelamin juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan pekerja laki laki lebih besar dibandingkan pekerja perempuan. Berdasarkan lokasi, tingkat pendapatan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah pedesaan.

3. **Ayushofa, Augustia (2015).** “Kontribusi Industri Udang Terhadap Penduduk Di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh manakah masyarakat sekitar terlibat dalam industri udang tersebut, untuk mengetahui keuntungan sosial ekonomi yang ditimbulkan industri udang terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Misya Mitra Kabupaten Pati. Populasi penelitian adalah 725 KK. Sampel penelitian menggunakan proportional random sampling atas dengan rincian masing-masing diambil 10% dari tiap KK karyawan penduduk asli Desa Waturoyo dan KK karyawan penduduk luar daerah sebagai sampel penelitian dengan jumlah 72 responden. Metode

pengumpulan data menggunakan metode observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan diskriptif persentase. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat sekitar dalam industri udang tersebut dan untuk mengetahui keuntungan sosial ekonomi yang ditimbulkan industri udang terhadap penduduk sekitar dan yang bukan penduduk sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Misaya Mitra merupakan industri yang terdapat di Kecamatan Margoyoso yang menggandeng sekitar 700 penduduk sekitar sebagai tenaga kerjadengan perbandingan prosentase tertinggi 68% penduduk asli dan 72% berpenghasilan Rp.1.000.000 - 2.000.000, sedang untuk akomodasi jenis uang transport presentase penerimanya adalah sebanyak 86% sedangkan untuk akomodasi jenis inventaris penerimanya adalah sebanyak 26%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan penduduk yang bekerja di industri udang PT. Misaya Mitra hampir tidak ada perbedaan itu penduduk daerah Desa Waturoyo maupun penduduk luar daerah Desa Waturoyo dan akomodasi jenis uang trasport penerimanya paling banyak dibanding akomodasi jenis inventaris. Saran Untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya hendak pekerja yang tidak menerima inventaris dari PT diberikan pengganti semisal kenaikan uang trasport, tunjangan kerja dan sebagainya.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Konsep Pembangunan

Pembangunan dapat dilihat dalam perspektif dan ukuran yang berbeda, oleh karena itu diperlukan persamaan persepsi dan kriteria dalam melihat makna pembangunan. Pembangunan pada awalnya hanya diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pada suatu negara, namun kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi khususnya pada Negara yang sedang berkembang.

Negara berkembang pada dekade tahun 1950-1960 mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari pembangunan, namun hal ini justru menimbulkan permasalahan baru yaitu disparitas. Pada dekade berikutnya arah dan konsep pembangunan diarahkan pada tujuan pemerataan sebagai mana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitikberatkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standar hidup masyarakat.

Dalam salah satu publikasi resminya, yakni *World Development Report*, yang terbit pada tahun 1991, Bank Dunia melontarkan pernyataan tegas bahwasanya (Todaro, 2006 : 22). Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di Negara-negara yang paling miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan pendapatan yang lebih tinggi – namun yang dibutuhkan bukan hanya itu.

Pendapatan yang lebih tinggi hanya merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal lain yang harus diperjuangkan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya.

Berdasarkan pernyataan bank dunia tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang memiliki cakupan luas bukan hanya semata untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun mencakup juga struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan (Todaro, 2006 : 28), yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.2.2. Konsep Tentang Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Jenjang pendidikan formal:

- 1) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - 2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
 - 3) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan,

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.

- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan (Todaro, 2004)

Menurut Becker dan Schultz pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian (Satria, 2008). Logika ini juga yang mendorong strategi

pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*).

Modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan human freedom secara umum. Selain itu, fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dapat lebih produktif dalam membangun bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial.

Tobing (2005) mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi.

Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah.

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*means years schooling*) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

2.2.3 Konsep Tentang Upah

Pada prinsipnya sistem penetapan upah umum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh/pekerja. Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh. Namun sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang upah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan

demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar.

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak dari pekerja/buruh yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kebijakan perlindungan pengupahan meliputi:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah untuk menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara potongan upah;

- g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- i. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
- j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Berkaitan dengan pengertian upah, Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Upah Minimum Regoinal adalah standart terendah yang digunakan para pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai atau karyawan dalam lingkup perusahaannya. Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;
- b. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Penetapan upah awalnya dilaksanakan setiap tahun. Awalnya penetapan upah tersebut berproses sangat lama dan panjang, Dewan Pengupah Daerah (DPD) yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan buruh

sepakat membentuk sebuah tim survey untuk melihat langsung kondisi lapangan, dimana apa saja kebutuhan yang dibutuhkan pegawai dan berapa harganya. Dari hasil survey tersebut diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kemudian tim DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan.

Kebutuhan hidup layak dijadikan pedoman penentu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang. Saat ini UMR juga sering disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang lingkupnya mencakup satu provinsi. Setelah itu dikenal juga dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Upah terbagi dalam tiga jenis yaitu:

1. Upah Pokok

Upah yang diberikan kepada pegawai dengan dibedakan atas upah per jam, per hari, per minggu, per bulan.

2. Upah Lembur

Upah yang diberikan kepada pegawai yang bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Tunjangan

Tunjangan merupakan sejumlah uang yang diterima pegawai secara keseluruhan karena adanya keuntungan dari perusahaan pada akhir tahun neraca.

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah mekanisme penetapan upah minimum juga mengalami perubahan secara signifikan, yang ditetapkan oleh Gubernur:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah, melalui Kanwil Depnaker setempat;
- b. Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP)/Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan (Pasal 6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999):

- a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK);
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
- d. Upah pada umumnya berlaku di daerah tertentu dan antar daerah;
- e. Kondisi pasar kerja; dan
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita

Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang berlaku bagi setiap buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.

Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam KEPMENAKERTRANS Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

2.2.4. Usaha Tambak Udang

Usaha hasil perikanan merupakan salah satu sub sistem utama dalam Usaha perikanan untuk mewujudkan pembangunan perikanan nasional. Adapun UHP yang dapat berkembang di wilayah pesisir meliputi : Industri penanganan ikan hidup, Industri penanganan ikan mati, Industri pembekuan ikan, Industri pengalengan ikan, Industri pengolahan tradisional, Usaha pengolahan produk diversifikasi dan hasil samping, Industri tepung ikan dan pakan ternak, dan Industri rumput laut.

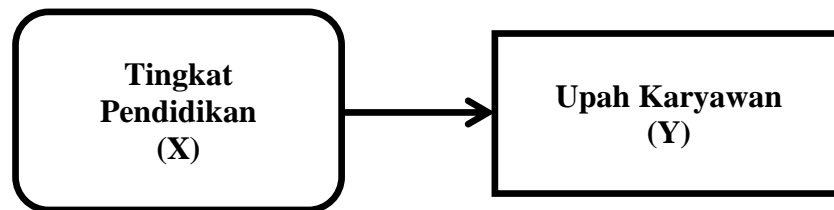
Dalam prinsip teori Weber (1907-1933) penentuan lokasi Usaha ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau biayanya paling murah atau minimal (*least cost location*) yaitu tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya minimum, tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Prinsip tersebut didasarkan pada enam asumsi bersifat prakondisi, yaitu wilayah

bersifat homogen dalam hal topografi, iklim dan penduduknya (keadaan penduduk yang dimaksud menyangkut jumlah dan kualitas SDM), ketersediaan sumber daya bahan mentah, upah tenaga kerja, biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi pabrik (biaya sangat ditentukan oleh bobot bahan mentah dan lokasi bahan mentah), persaingan antar kegiatan industri, manusia berpikir secara rasional.

Weber juga menyusun sebuah model yang dikenal dengan istilah segitiga lokasional (*locational triangle*), yang didasarkan pada asumsi bahwa daerah yang menjadi obyek penelitian adalah daerah yang terisolasi. konsumennya terpusat pada pusat-pusat tertentu semua unit perusahaan dapat memasuki pasar yang tidak terbatas dan persaingan sempurna, semua sumber daya alam tersedia secara tidak terbatas, barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadik tersedia secara terbatas pada sejumlah tempat, tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi (Marsudi, 1992).

Usaha Tambak udang sebagai kegiatan untuk menghasilkan produksi udang secara massal dengan mutu yang bagus untuk kemudian dijual dan diperdagangkan menjaga kemassalannya digunakan sejumlah tenaga kerja dengan peralatan, teknik dan cara serta pola kerja tertentu, Kuwartoyo (dalam setyawati, 2002).

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Sketsa Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka adalah sebagai variabel bebas Tingkat Pendidikan (X) garis lurus untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Y) yaitu Indeks Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano dengan menggunakan teknik analisa data dengan Regresi linear Sederhana.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, penelitian terdahulu dan landasan teori penelitan diatas maka dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu “Diduga bahwa ada pengaruh yang signifikan Tingkat Pendidikan terhadap Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Asosiatif. Penelitian Asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh dan hubungan antara Tingkat Pendidikan terhadap Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Dalam proposal penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan menggunakan angka-angka yang menunjukkan gambaran tentang objek yang diteliti seperti besarnya Tingkat Upah Karyawan Pada Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data berupa keterangan untuk menjelaskan angka-angka atau deskripsi mengenai angka-angka yang berhubungan dengan objek penelitian seperti Profil Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano.

3.2.2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam arti data tersebut diperoleh dari sumber kedua (Sugiyono, 2012:55). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari Perusahaan Tambak Udang Di Kecamatan Poto Tano berupa Tingkat Pendidikan dan Upah Karyawan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan catatan-catatan atau data yang berhubungan penelitian ini seperti Tingkat Pendidikan dan Upah Karyawan

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan, penelusuran dan pengumpulan data-data mengenai obyek yang diperlukan untuk penelitian (Arikunto, 2006).

3. Study Kepustakaan,

Merupakan cara pengumpulan data yang bersumber dari penelaahan kepustakaan berupa jurnal-jurnal, laporan-laporan, dan referensi yang ada hubungannya dengan Tingkat Pendidikan dan Upah Karyawan.

3.4. Identifikasi dan Klasifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2008), dengan kata lain variabel dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable/Y*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Upah Karyawan.
2. Variabel Bebas (*Independent Variable/X*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012:59). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Tingkat Pendidikan.

3.5. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti (Sugiyono, 2012). Jadi definisi operasional variabel adalah penjelasan teknis atas variabel penelitian yang digunakan. Adapun definisi oprasional dari variabel dalam penelitian ini adalah:

1. **Upah Karyawan** adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan tambak udang dari hasil bekerja selama satu bulan yang diukur dalam satuan Rupiah.
2. **Tingkat Pendidikan** adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan yang dilalui oleh karyawan tambak udang melalui jenjang Formal, proses perbuatan yang diukur dalam satuan Nominal.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya maka digunakan metode analisis Analisis regresi linear sederhana yakni analisis untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) yaitu Tingkat Pendidikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu Upah Karyawan.

Bentuk matematisnya (Suliyanto, 2008:160) sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \varepsilon$$

Di mana : Y = Upah Karyawan

 X = Tingkat Pendidikan

 a = Konstanta

 b = Koefisien Regresi

ε = Nilai Residu

3.6.2 Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (X) apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial.

a) Menguji ada tidaknya pengaruh paling dominan terhadap variabel independen tertentu (X) secara individu terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_1 = 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y.

$H_a : b_1 \neq 0$, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y.

b) Menentukan *level of significant* $\alpha = 5\%$.

c) Menarik kesimpulan.

H_0 diterima apabila : $-t(\alpha/2) < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}(\alpha/2)$

H_a ditolak apabila : $-t_{\text{hitung}} > t(\alpha/2)$ atau $t_{\text{hitung}} < -t(\alpha/2)$

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat mengimpormasikan baik atau tidaknya model regresi yang teristemasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkan garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak

dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan 1 Santoso dalam buku (Sugiyono, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, SNA 9*. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Hal 1-27, Agustus.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2016*. NTB: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Boediono. 2001. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.
- DJP2HP] Direktorat Jendral Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Prikanan. 2015.
- Elfindri 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang hlm:69 Andalas University Press.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Januari, 2005.
- Halim, Abdul, *Seri Akuntansi Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Harahap, Sofyan Syafri.1999. *Akuntansi Aktiva Tetap: Akuntansi Pajak, Revaluasi, Leasing*.Edisi Kelima, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi.
- Ilham Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?. World Bank Working Paper No. 2739*. Washington D.C.: World Bank. Diakses dari: <http://papers.ssrn.com>
- Mamesah, D.J, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Marsudi Djojodipuro. 1992. *Teori Lokasi*. Lembaga Penelitian FakultasEkonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum, Jakarta.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER-01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Ramires, Ranis, and Stewart (1998); *The Meaning of Development "International Development Review" Journal Vol. XIX Number 2.*

Ramirez, A., G. Ranis, and F. Stewart. 1998. *"Economic Growth and Human Capital"*. QEH Working Paper No. 18.

Rudolf Lumban Tobing. (2005). Pengaruh Manajemen Labapada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo.

Rollin Niswonger, C., & Fess Philip, E. 1992 *Dasar-dasar Akutansi*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 22.

Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Peneribit Ghalia Indonesia, 2003.

Satria, Indra. (2008). Perancangan Situs IGCP – Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Setyawati, E.A. (2002), Pengaruh Kegiatan Operasi Kawasan Industri terhadap Perkem- bangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Skripsi, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, IPB.

Sidik, Machfud, et al, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.

Sitepu, M.J. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Cetakan ke tiga. Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta.

Skripsi Ayushofa, Augustia (2015). "Kontribusi Industri Udang Terhadap Penduduk Di Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati".

Skripsi Dedi Julianto (2019), "Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Individu Di Sumatera Barat".

Skripsi Saidin (2016) "Analisis Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Minyak Goreng Asli Mandar di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene".

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, LPFE UI dengan Bina Grafika, 1985.

Suliyanto. 2008. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor: Ghalia Indonesia.

Todaro, Michael.P. 2004, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael, 2006. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, hlm: 22 & 28 Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Weber, P. 1907-1933. Penentuan Lokasi Usaha